



**PUTUSAN**  
**Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Nga**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Kabupaten Jembrana, agama Hindu, sebagai  
**Penggugat** ;

Lawan:

**Tergugat**, Kabupaten Jembrana, agama Hindu, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 8 November 2023 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah kawin secara sah menurut adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 12 April 2014 di rumah kediaman Tergugat, Kabupaten Jembrana.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat itu telah didaftarkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana sebagaimana tertuang dalam Akte Perkawinan nomor XXX tertanggal 15 Agustus 2014.
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak. Anak kesatu bernama ANAK 1, laki laki, lahir 22 Oktober 2014. Anak kedua bernama ANAK 2, perempuan, lahir 7 November 2016. Anak ketiga bernama ANAK 3, laki laki, lahir 28 Maret 2020.

*Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Nga*



4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat rukun harmonis sebagai mana layaknya sepasang suami istri yang saling mencintai.
5. Bahwa keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama. Selang setahun setelah pernikahan mulailah timbul pertengkaran dan percecokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa penyebab pertengkaran dan percecokan yang terus menerus terutama karena Penggugat dan Tergugat masih menumpang tinggal di rumah Orang Tua Tergugat. Hal ini sering memicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Mertua yang semakin lama semakin memberi tekanan mental pada Penggugat. Solusi yang diajukan Penggugat untuk mengajak Tergugat tinggal di rumah terpisah dan memulai kehidupan yang lebih mandiri sebagai suami istri tidak pernah ditanggapi dengan serius oleh Tergugat.
7. Bahwa walaupun dengan situasi seperti itu Penggugat berusaha maksimal untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat tetapi nyatanya tidak berhasil.
8. Puncaknya mulai bulan April 2022 Tergugat dengan terpaksa memutuskan untuk pisah tinggal dengan Tergugat.
9. Pada tanggal 15 Nopember 2022 dalam rapat Kertha Desa di Desa Adat Gumbrih, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana, Penggugat mengajukan permohonan cerai secara adat dengan Tergugat yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Kertha Desa nomor 01/KDA.G/XI/2022.
10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dirukunkan kembali sebagai suami istri dan jalan damai tidak mungkin ditempuh lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam UU Perkawinan no 1 tahun 1974 yaitu untuk membina rumah tangga bahagia, kekal dan abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa semakin jauh dari kenyataan dan harapan, maka sudah



sepatutnyalah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus karena perceraian.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Penggugat memohon kehadiran Yth. Ketua Pengadilan Negeri Negara untuk berkenan menerima gugatan Penggugat untuk kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat dengan segera, memeriksa dan mengadili gugatannya ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 12 April 2014 sesuai dengan akta perkawinan nomor XXX tertanggal 15 Agustus 2014 adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana di Negara agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
4. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Nga tanggal 8 November 2023 dan tanggal 17 November 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

*Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Nga*



Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang oleh Penggugat terhadap isinya tetap dipertahankan tanpa adanya perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi SAKSI dan Saksi SAKSI;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 12 April 2014 sesuai dengan akta perkawinan nomor XXX tertanggal 15 Agustus 2014 adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat pada pokoknya adalah adanya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi terus menerus;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut di atas. Pengadilan sebelum mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini yaitu pernyataan mengenai perceraian, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hubungan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX antara (Tergugat) dengan (Penggugat) tertanggal 15 Agustus 2014 diterangkan bahwa perkawinan



antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 12 April 2014 di Gumbrih, dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama, maka dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat alasan untuk memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun bahagia dan harmonis. Namun hal tersebut tidak berlangsung lama. Selang setahun setelah pernikahan mulailah timbul pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa meskipun terdapat alasan untuk bercerai atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (huruf f) tersebut di atas, namun Penggugat tetap harus membuktikan alasan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAKSI(kakak kandung dari Penggugat) dan Saksi SAKSI (kakak ipar dari Penggugat) yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan perceraian karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan ditambah Mertua Tergugat terlalu sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat masih tinggal menumpang di rumah orangtua Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa tertekan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah kos, namun baru sebulan, Tergugat sudah ingin kembali ke rumah orangtuanya, sehingga Penggugat menurut saja, kemudian kembali lagi Penggugat dan Tergugat cekcok terus menerus;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2022. Terhadap permasalahan tersebut telah dilakukan mediasi bersama pihak keluarga dan Adat. Namun mediasi tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin berpisah sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara Rapat Kertha Desa tanggal 15 November 2022 (vide bukti surat bertanda P-9);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut, adanya perpisahan akibat sering terjadi perselisihan (ketidakcocokan) adalah perkawinan yang tidak sesuai lagi dengan tujuannya yang membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau dengan kata lain Penggugat dapat membuktikan dalilnya bahwa perkawinan putus karena perceraian dengan alasan seperti tersebut diatas. Dengan demikian petitum 2 gugatan Penggugat dikabulkan dengan redaksi tersebut pada amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana di Negara agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi kependudukan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu". Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dengan demikian petitum angka 3 gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan ketentuan pencatatan lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 140K/Sip/71 memuat “keputusan *Judex Facti* yang didasarkan kepada *petitum subsidair* yaitu permohonan mengadili menurut kebijakan pengadilan hingga karenanya merasa tidak terikat kepada rumusan *petitum primair*, dapat dibenarkan karena dengan demikian lebih diperoleh suatu keputusan yang mendekati rasa keadilan, asalkan masih kerangka yang serasi dengan *inti petitum primair*”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya antara lain mohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya, dan terkait dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan tidak merubah esensi *petitum* gugatan maka redaksional *petitum* dalam gugatan yang dikabulkan dalam amar putusan perlu disesuaikan agar putusan ini dapat dieksekusi dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu dan Adat Bali pada

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 April 2014 di Gumbrih, dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXtertanggal 15 Agustus 2014 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk selanjutnya dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin tanggal 27 November 2023, oleh kami, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriyo Murtitomo, S.H. dan Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 239/Pdt.G/2023/PN Nga tanggal 8 November 2023, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Komang Sastrini, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satriyo Murtitomo, S.H.

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Wajihatut Dzikriyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Komang Sastrini, S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2.....A	:	Rp50.000,00;
TK .....	:	
3.....P	:	Rp32.000,00;
anggilan .....	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP .....	:	
5.....S	:	Rp50.000,00;
umpah .....	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai .....	:	
7.....R	:	<u>Rp10.000,00;</u>
edaksi .....	:	
Jumlah	:	Rp202.000,00; (Dua ratus dua ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Nga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)